

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jurusan Akuntansi**

**Oleh :**

**TINO KHARISMA PUTRA  
B 200100024**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membuat skripsi dengan judul:

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**

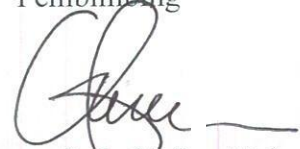
Yang ditulis oleh:

Nama : TinoKharisma Putra  
NIM : B 200100024  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 9 Februari 2018

Pembimbing



(Fauzan, S.E., M.S , Ak.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, MM.)

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

Yang ditulis oleh :

**TINO KHARISMA PUTRA**

**NIM. B 200100024**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 3 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. (Fauzan, S.E., M.Si., Ak.)

(Ketua Dewan Penguji)

2. (Drs. Atwal Arifin, M.Si., Akt)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. (Dr. FatchanAhyani, SE, M.Si.)

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)



Dekan,

  
**Dr. Syamsudin, MM**

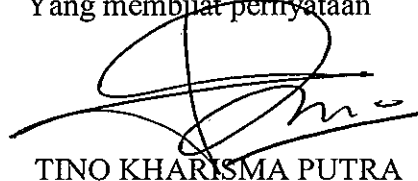
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untusk memperoleh gelar kesajarnaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan mempetanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

TINO KHARISMA PUTRA

## ABSTRAK

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

Tino Kharisma Putra  
B 200100024

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ukuran (*size*) terhadap pengendalian intern, menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengendalian intern, dan menganalisis kompleksitas daerah terhadap pengendalian intern. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Sumber data berasal dari laporan statistik mengenai *size*, PAD, kompleksitas, pengendalian intern yang ada di BPS DI Yogyakarta periode 2009-2014. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Size* berpengaruh terhadap pengendalian intern, (2) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengendalian intern, (3) Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern.

Kata kunci: Size, PAD, Kompleksitas, Pengendalian Intern.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the size (size) of internal control, analyze the Original Regional Revenue (PAD) against internal control, and analyze the complexity of the region against internal control. The design of this research is descriptive research with quantitative approach. Sampling technique used for sampling in this research is to use purposive sampling method. Source of data comes from statistical reports about size, PAD, complexity, internal control in BPS DI Yogyakarta period 2009-2014. Analyzer in this research use doubled linear regression. The result of the research shows that: (1) Size has an effect on internal control, (2) The original revenue of the region has an effect on internal control, (3) Complexity has no effect to internal control.*

*Keywords: Size, PAD, Complexity, Internal Control.*

## **1. PENDAHULUAN**

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menuntut adanya perubahan setiap kebijakan dalam setiap pemerintahan. Pemerintahan yang dulunya terpusat atau sentralisasi sekarang menjadi desentralisasi. Adanya otonomi daerah di Indonesia menjadikan perlunya pengawasan dalam menjalankan otonomi daerah agar tidak terjadi kecuranagan (*fraud*). *Fraud* yang terjadi dalam sebuah organisasi sektor publik atau swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Menurut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2010 terhadap 516 LKPD, terdapat 5.193 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, sedangkan tahun 2011 BPK menemukan jumlah kelemahan SPI 5.675 kasus terhadap 520 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meningkatnya jumlah temuan kasus yang terkait kelemahan pengendalian intern tentu tidak sejalan dengan tekad pemerintah yang ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pengendalian intern berperan penting untuk mengkoordinasi dan mengawasi semua bagian dan sumber daya perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, menjamin manajemen perusahaan agar laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya, untuk mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber

daya perusahaan, serta dapat menyediakan informasi dalam menilai kinerja perusahaan dan menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan juga dalam pengambilan keputusan perusahaan. Salah faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern adalah pertumbuhan. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Doyle *et al* (2007) yang menyebutkan bahwa adanya personil baru, proses, dan teknologi biasanya dibutuhkan untuk menyeimbangkan pengendalian intern dengan pertumbuhan entitas usaha tersebut.

Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi neoklasik dari Solow dan Swan (1956) dalam Kneller et al (1999) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak. Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja, dan teknologi yang bersifat eksogen. Di Indonesia sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi.

Menurut penelitian Campbell (2002) dalam Darmayanti (2012) ukuran (*size*) memberikan pengaruh yang mendua (*ambiguous*) terhadap kinerja perusahaan. Pertama bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan biaya yang lebih besar sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki skala dan keleluasaan ekonomis yang menyebabkan hubungan positif antara ukuran

perusahaan dengan profitabilitas. Ukuran suatu entitas juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern.

Penelitian Doyle *et al* (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan dengan kelemahan pengendalian intern perusahaan. Selanjutnya dalam penelitian Martini dan Zaelani (2011) menemukan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern, sedangkan penelitian Nirmala (2012) dan Putro (2013) tidak menemukan pengaruh antara ukuran terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Argumen ini didasarkan atas penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penelitian Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) yang menemukan beberapa sumber pendapatan membuat masalah



pengendalian intern meningkat, sedangkan penelitian Puspitasari (2013) tidak menemukan pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian intern.

## **2. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:86) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Sugiyono (2009:46) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009:116) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sumber data untuk dianalisis dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa laporan statistik mengenai *size*, PAD, kompleksitas, pengendalian intern yang ada di BPS DI Yogyakarta periode 2009-2014.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dimaksud adalah laporan hasil pemeriksaan dari BPK atas BPS DI Yogyakarta periode

2009-2014 yang telah diaudit. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Uji Asumsi Klasik**

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*, dapat diketahui bahwa *p-value* dari *unstandardized residual* ternyata lebih besar dari  $\alpha$  ( $p > 0,05$ ) yaitu  $0,470 > 0,05$ , sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. Selanjutnya hasil perhitungan uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki *tolerance* lebih dari 0,1 ( $> 0,1$ ) dan semua variabel bebas memiliki nilai *VIF* kurang dari 10 (Ghozali, 2001). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansinya (*p value*)  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi. Hasil dari uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (dW) sebesar 1,366. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen.

#### b. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini regresi berganda. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel.4.**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	p-value
Konstanta	6.914	1.315	0.200
Size	-0.241	-1.406	0.172
Pendapatan Asli Daerah	0.032	3.684	0.001
Kompleksitas	0.042	0.443	0.662
R <sup>2</sup> = 0,349	F <sub>hitung</sub> = 4,645		
Adjusted R <sup>2</sup> = 0,274	Sig = 0,010		

Sumber: Data diolah 2016

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut:

$$PI = 6,914 - 0,241Size + 0,032 PAD + 0,042KP + \varepsilon$$

- 1) Nilai konstanta sebesar 6,914 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel *Size*, pendapatan asli daerah dan kompleksitas diasumsikan bernilai nol atau konstan maka pengendalian intern akan meningkat sebesar 6,914.
- 2) Besarnya nilai koefisien variabel *Size* sebesar -0,241 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan *size* sebesar 1% maka pengendalian intern akan menurun sebesar 0,241 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 3) Besarnya nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,032 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan

pendapatan asli daerah sebesar 1% maka pengendalian intern akan meningkat sebesar 0,032 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

- 4) Besarnya nilai koefisien variabel kompleksitas sebesar 0,042 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kompleksitas sebesar 1% maka pengendalian intern akan meningkat sebesar 0,042 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

### c. Uji Hipotesis (Uji t)

#### 1. Pengujian Hipotesis pertama ( $H_1$ )

Variabel *Size* memiliki nilai  $t_{hitung}$  (-1,406) lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  (2,055) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,72 > \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti **H1 ditolak**, sehingga *Size* tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa ukuran suatu daerah tidak mempengaruhi pengendalian intern, baik daerah skala besar maupun skala kecil sistem pengendalian intern merupakan hal yang penting untuk melakukan *maintenance* terhadap sistem pengendalian intern, contohnya memberikan pelatihan atau *training* secara berkala kepada pekerja mengenai sistem pengendalian intern, sehingga apapun ukuran pemerintah daerah jika menginginkan pemerintahan yang bersih maka pengendalian intern tetap diperlukan, tidak hanya untuk pemerintah daerah yang berukuran besar.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri dan Mahmud (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengendalian intern.

## 2. Pengujian Hipotesis kedua ( $H_2$ )

Variabel Pedapatan Asli Daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  (3,648) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,055) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti **H2 diterima**, sehingga Pedapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengendalian intern.

Hasil ini dapat dijelaskan karena semakin tinggi PAD suatu daerah maka, resiko yang akan terjadi juga semakin besar, resiko penyalahgunaan alokasi PAD untuk kegiatan yang tidak seharusnya, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah daerah memerlukan sistem pengendalian intern yang lebih baik, supaya alokasi PAD tepat pada sasaran yang telah dianggarkan.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Putri dan Mahmud (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern, karena pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi belum menjamin pengendalian internnya juga menjadi lebih baik daripada pemerintah daerah yang memiliki PAD lebih rendah.

## 3. Pengujian Hipotesis ketiga ( $H_3$ )

Variabel kompleksitas memiliki nilai  $t_{hitung}$  (0,443) lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  (2,055) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,662 > \alpha$

= 0,05. Hal ini berarti **H3 ditolak**, sehingga kompleksitas tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa banyaknya SKPD yang terdapat di pemerintah daerah, akan memperlemah pengendalian intern, hal ini dikarenakan banyaknya SKPD membuat pemimpin daerah sulit melakukan pengawasan secara langsung dan apabila setiap SKPD tidak memiliki komitmen organisasi yang kuat, maka akan cenderung melakukan banyak penyimpangan dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang ada, sehingga dapat memperlemah pengendalian intern. Hasil ini sesuai dengan penelitian Putri dan Mahmud (2015) yang menjelaskan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Size*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas (KP) terhadap Pengendalian Intern (PI). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Size* berpengaruh terhadap pengendalian intern. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  (-1,406) lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  (2,055) atau nilai signifikan sebesar  $0,172 < 5\%$ , sehingga **H<sub>1</sub> ditolak**.

2. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengendalian intern. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  (3,684) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,055) atau nilai signifikan sebesar  $0,002 < 5\%$ , sehingga **H<sub>2</sub> diterima**.
3. Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  (0,443) lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  (2,055) atau nilai signifikan sebesar  $0,662 > 5\%$ , sehingga **H<sub>3</sub> ditolak**.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sampel pada penelitian ini terbatas pada Kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang berbeda mungkin akan diperoleh apabila menambah sampel yang lain.
2. Variabel yang digunakan mencakup *Size*, pendapatan asli daerah, kompleksitas, dan pengendalian intern. Hasil yang berbeda mungkin akan diperoleh apabila menambah variabel-variabel yang lain.
3. Peneliti hanya menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sehingga data yang dikumpulkan kurang luas.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas penelitian berikut. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel seluruh kabupaten/kota pada seluruh provinsi di Indonesia.

2. Menambah variabel-variabel penelitian lain, seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian menggunakan sampel yang banyak dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan teknik pengambilan sampel lainnya, sehingga data yang diteliti lebih luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Doyle, Ge, Weili dan McVay. (2007). *Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting*. Working paper, Utah State University, University of Washington, dan New York University.

Martani, D dan F. Zaelani. 2011. “*Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah*”. *Simposium Nasional Akuntansi XXIV*. 21-22 Juli 2011. Banda Aceh.

Petrovits, Christine , Shakespeare, Chaterine dan Shih, Aimee. 2010. The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *Accounting Review*.

Putri dan Mahmud (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda*. *Accounting Analysis Journal*. FEB UNDIP.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah